

bab i

pendahuluan

1. 1 latar belakang

konsep akuntabilitas seringkali dianggap sebagai 'bunglon' dalam dunia pemerintahan dan bisnis. konsep akuntabilitas terus beradaptasi dengan lingkungan yang dinamis. fleksibilitas yang tinggi ini, sebagaimana ditegaskan oleh sejumlah peneliti justru menjadi tantangan tersendiri dalam implementasinya. penelitian akuntabilitas telah menjadi sorotan utama diberbagai sektor (bovens *et al.*, 2014). konsep akuntabilitas sendiri dianggap sebagai konsep yang dinamis dan kontekstual, sebagaimana ditegaskan oleh (sinclair, 1995), (mulgan, 2000), (dubnick, 2003), yang menyebutnya sebagai konsep yang fleksibel dan menyesuaikan diri dengan konteks yang beragam. kurangnya kerangka kerja dan panduan yang konsisten tentang untuk apa, kepada siapa dan bagaimana akuntabilitas harus dilaksanakan (an *et al.*, 2021) semakin memperkuat pandangan ini.

sejalan dengan itu, (purnomosidi *et al.*, 2018) dan (ummah ,2019) menegaskan bahwa akuntabilitas publik merupakan konsep yang kompleks dan sulit diwujudkan. purnomosidi *et al.* (2018) mencatat bahwa definisi akuntabilitas masih terus diperdebatkan, sementara ummah (2018) menegaskan bahwa mewujudkan akuntabilitas jauh lebih kompleks dibandingkan memberantas korupsi. hal ini dikarenakan akuntabilitas melibatkan perubahan sistemik yang luas, tidak hanya sebatas spesifik seperti korupsi. konsep akuntabilitas merupakan konsep yang kompleks dan multidimensi. dinamika konsep ini, ditambah dengan kurangnya kerangka kerja yang konsisten dan tantangan dalam implementasinya,

menjadikan akuntabilitas sebagai salah satu isu penting dalam berbagai sektor, terutama sektor publik.

selanjutnya, Guarini (2003) mengatakan bahwa akuntabilitas tidak hanya sebatas transparansi keuangan, tetapi juga mencakup tanggung jawab atas nilai publik yang dihasilkan. Oleh karenanya, pemahaman akuntansi dan sistem informasi yang menghasilkan akuntabilitas perlu ditinjau dari berbagai sudut pandang yaitu dari *accountor* (dalam hal ini pemerintah daerah) ke *accountee* (*stakeholder*) (Damayanti *et al.*, 2017). Akuntabilitas pemerintah daerah harus mencakup transparansi keuangan dan tanggung jawab atas nilai publik yang dihasilkan, dengan melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan.

berbagai studi akuntabilitas telah dilakukan untuk memahami bagaimana akuntabilitas diimplementasikan, dirasakan, dan diatasi oleh berbagai pihak (Makanga *et al.*, 2024). Penelitian yang dilakukan oleh Pérez Durán, (2016) di 24 negara Eropa menunjukkan bahwa penyediaan informasi yang kredibel terkait kinerja pemerintah dapat meningkatkan tanggapan positif masyarakat terhadap akuntabilitas pemerintah. Hasil penelitian ini menekankan pentingnya transparansi dan kualitas informasi dalam membangun kepercayaan publik serta memperkuat persepsi akuntabilitas yang efektif di sektor publik. Penelitian yang dilakukan oleh Bovens *et al.*, (2014) di sisi lain, manajer publik merasakan tekanan untuk mencapai target dan bertanggung jawab atas penggunaan sumber daya. Kegagalan memenuhi standar akuntabilitas dapat mengakibatkan sanksi. Akuntabilitas merupakan konsep yang multidimensi dan saling terkait. Untuk mencapai akuntabilitas yang efektif, diperlukan kombinasi antara transparansi informasi, tekanan kinerja yang seimbang, serta mekanisme yang memungkinkan partisipasi berbagai pihak.

penelitian-penelitian mengenai akuntabilitas publik telah mengungkap berbagai dinamika yang kompleks. penelitian schillemans (2015) menemukan bahwa manajer publik menggunakan berbagai strategi untuk mengatasi akuntabilitas, seperti negosiasi target, manipulasi data, dan membangun hubungan dengan politisi dan pejabat senior. kapasitas akuntabilitas publik yang kuat sangat penting untuk mengendalikan penyimpangan pengeluaran dana publik. di sisi lain, penelitian khan & chowdhury, (2007) menunjukkan bahwa demokrasi dan supremasi hukum merupakan faktor penting yang mendukung tata kelola akuntabilitas publik yang efektif. partisipasi masyarakat sipil juga dapat membantu meningkatkan akuntabilitas publik dan mengendalikan korupsi. membangun akuntabilitas publik merupakan sebuah proses yang berkelanjutan dan membutuhkan komitmen dari berbagai pihak. dengan adanya system akuntabilitas yang kuat, diharapkan dapat mencegah terjadinya korupsi dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah.

penelitian tentang akuntabilitas menjadi semakin krusial dalam konteks global saat ini, terutama mengingat dinamika yang terus berubah dalam tata kelola sektor publik dan swasta (anirwan dan irawansyah, 2022). meskipun banyak studi telah menyoroti pentingnya akuntabilitas, namun masih terdapat kesenjangan signifikan dalam pemahaman bagaimana konsep ini diimplementasikan dan diinternalisasikan oleh berbagai aktor dalam organisasi. di tengah meningkatnya tuntutan untuk transparansi dan efisiensi. banyak permasalahan akuntabilitas yang berakar pada nilai-nilai, norma, dan keyakinan yang dianut dalam suatu budaya organisasi atau masyarakat (bakhrur rokhman , denok kurniasih, 2023). akuntabilitas merupakan konsep yang kompleks dan multidimensi. untuk mencapai akuntabilitas yang efektif diperlukan pemahaman yang mendalam

mengenai faktor-faktor yang memengaruhinya, serta upaya untuk mengatasi berbagai tantangan yang ada.

selain menggunakan pendekatan positivisme, penelitian tentang akuntabilitas di sektor publik dengan menggunakan pendekatan non-positivisme semakin berkembang. sebagai contoh, randa dan daromes (2014) menunjukkan bahwa ada dua jenis akuntabilitas, yaitu akuntabilitas *input* (pertanggungjawaban atas penyusunan program yang dilakukan oleh pemerintah daerah) dan *output* (kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat). rekonstruksi akuntabilitas *input* dan *output* dinyatakan dalam kegiatan kelompok (duduk bersama untuk memecahkan masalah). demikian juga damayanti *et al.*, (2017) temuan dari penelitiannya adalah bahwa pemerintah kabupaten gowa belum melakukan upaya sukarela untuk menyesuaikan model manajemen dan pelaporan mereka dengan kebutuhan khas akuntabilitas sektor publik. penyesuaian semacam itu harus dimulai dari mendefinisikan dengan jelas tujuan yang ditugaskan kepada pemerintah daerah sehingga indikator dapat ditemukan untuk mengukur sejauh mana tujuan telah tercapai. pendekatan non-positivisme dalam memahami konsep akuntabilitas terutama dalam konteks sektor publik sangat diperlukan. akuntabilitas merupakan fenomena sosial yang sangat kompleks, dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti budaya, politik, ekonomi, dan nilai-nilai sosial. pendekatan positivisme yang cenderung mengukur *variable* secara kuantitatif seringkali tidak mampu menangkap nuansa pemahaman yang lebih kaya dan mendalam.

termotivasi dengan penelitian-penelitian dari non-positivis sebelumnya, penulis ingin mengeksplor lebih dalam tentang pemahaman akuntabilitas dengan pendekatan budaya. seperti yang penulis jelaskan diatas, akuntabilitas bukanlah konsep yang statis, melainkan konstruksi sosial dipengaruhi oleh nilai-nilai, norma,

dan keyakinan yang dianut oleh suatu masyarakat. pendekatan budaya memungkinkan untuk menggali akar-akar pemahaman dan praktik akuntabilitas yang unik dalam konteks budaya suku ammatoa kajang. selain itu juga akuntabilitas melibatkan interaksi antara berbagai aktor, institusi dan proses. maka pendekatan budaya digunakan untuk memahami bagaimana berbagai elemen ini saling terkait dan membentuk sistem akuntabilitas yang kompleks. selanjutnya, bukti empiris yang ada lebih banyak berfokus pada aspek normative tanpa mengeksplorasi secara mendalam bagaimana akuntabilitas dipahami dan dipraktikkan di berbagai konteks. mengingat kompleksitas dan fleksibilitas akuntabilitas, penelitian ini dengan pendekatan budaya sangat diperlukan dan diharapkan dapat memberikan wawasan baru mengenai strategi dan mekanisme yang digunakan oleh organisasi dalam memenuhi standar akuntabilitas yang terus berkembang. penelitian ini tertarik untuk menggali lebih dalam mengenai bagaimana nilai-nilai budaya lokal memengaruhi pemahaman dan praktik akuntabilitas di sektor publik terus berevolusi, serta implikasi dari dinamika ini terhadap kualitas layanan publik dan kepercayaan masyarakat.

di benua eropa dan asia, penelitian tentang akuntabilitas terus berkembang. di eropa, tekanan akuntabilitas telah diformalkan melalui deklarasi (farneti, 2004); bovens (2010) menemukan bahwa di negara-negara dengan demokrasi yang mapan, akuntabilitas lebih dimaknai sebagai responsivitas pemerintah terhadap publik. ketika hal itu terjadi tentunya akan mendorong partisipasi publik yang lebih tinggi dan kualitas layanan publik yang lebih baik. sedangkan di negara-negara dengan demokrasi yang lemah, akuntabilitas lebih dimaknai sebagai kepatuhan terhadap aturan dan prosedur. akibatnya menghambat inovasi dan fleksibilitas dalam merespon kebutuhan masyarakat

serta berpotensi menciptakan birokrasi yang kaku dan mengurangi kepercayaan publik.

senada dengan itu culvera dan warfingeb (2012) mengatakan tekanan untuk meningkatkan akuntabilitas semakin meningkat diberbagai sektor, baik di eropa maupun amerika serikat. di eropa, komisi eropa mendorongnya, sedangkan di amerika serikat, pemerintah federal yang menjadi motornya. lembaga-lembaga dipaksa untuk mengukur efektifitas mereka dengan cara yang lebih transparan kepada badan pemerintah dan masyarakat umum. hal ini didorong oleh keinginan untuk memastikan bahwa organisasi dan individu bertanggungjawab atas tindakan mereka dan bahwa sumber daya yang digunakan secara efektif dan efisien. tekanan akuntabilitas ini terus memicu diskusi di kalangan akademisi dan praktisi tentang “kualitas dan definisi “kualitas” itu sendiri. seringkali, diskusi ini memiliki tujuan yang berbeda dan menggunakan pendekatan dan kerangka kerja yang berbeda (dhipayanti & dewi, 2023). diskusi tentang akuntabilitas sering kali **memiliki tujuan yang berbeda dan menggunakan pendekatan yang berbeda.** penelitian terkini menunjukkan adanya tren global yang semakin meningkat dalam menuntut akuntabilitas di berbagai sektor, baik ditingkat nasional maupun internasional. dorongan ini berasal dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga internasional dan masyarakat sipil. tujuan utama dari peningkatan tuntutan akuntabilitas adalah untuk memastikan bahwa organisasi dan individu bertanggungjawab atas tindakan mereka, serta memastikan penggunaan sumber daya secara efektif dan efisien. namun, ditengah meningkatnya tekanan akuntabel, muncul tantangan yang signifikan terkait dengan definisi dan pengukuran “kualitas”. diskusi mengenai kualitas seringkali bersifat multidisiplin dan melibatkan berbagai perspektif, sehingga menghasilkan beragam definisi dan

pendekatan. hal ini menunjukkan bahwa konsep kualitas itu sendiri bersifat kompleks dan dinamis, serta sangat kontekstual.

penelitian tentang akuntabilitas di indonesia terus berkembang. damayanti *et al.*, (2017) menemukan bahwa pemerintahan kabupaten gowa belum secara sukarela menyesuaikan model pengelolaan dan pelaporan mereka dengan kebutuhan khas akuntabilitas sektor publik. penyesuaian ini penting untuk memastikan kejelasan tujuan dan indikator pengukurannya. penelitian lain oleh (zulkifli *et al.*, 2020) menunjukkan bahwa kompetensi aparatur desa, komitmen organisasi, dan partisipasi masyarakat desa secara positif dan signifikan memengaruhi akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa. akuntabilitas merupakan elemen penting dalam tata kelola pemerintahan yang baik. di indonesia, penelitian tentang akuntabilitas terus berkembang, namun masih terdapat berbagai tantangan yang perlu diatasi. upaya untuk meningkatkan akuntabilitas harus dilakukan secara komprehensif dan berkelanjutan.

salah satu cara untuk memahami akuntabilitas adalah menggunakan kerangka kerja yang dikemukakan oleh schelder (1997) mendefinisikan tiga jenis akuntabilitas: akuntabilitas jawaban (*accountability of answers*), akuntabilitas proses (*process accountability*), dan akuntabilitas hasil (*accountability for results*). pertama, akuntabilitas jawaban fokusnya adalah pada kewajiban untuk memberikan penjelasan dan pertanggungjawaban atas tindakan atau keputusan yang telah diambil. akuntabilitas jawaban melibatkan transparansi dan keterbukaan informasi. kedua yaitu akuntabilitas proses menekankan pada kewajiban untuk mengikuti prosedur dan aturan yang telah ditetapkan dalam pengambilan keputusan atau pelaksanaan suatu tindakan. ketiga yaitu akuntabilitas hasil berfokus pada pencapaian tujuan atau hasil yang dicapai atau ditetapkan. ketiga jenis akuntabilitas ini saling terkait dan saling melengkapi.

dari ketiga kerangka kerjanya schelder, penelitian ini berfokus menggunakan kerangka kerja akuntabilitas pertanggungjawaban, khususnya akuntabilitas publik dana desa. dari berbagai banyak akuntabilitas dalam sektor publik yang paling menarik adalah akuntabilitas publik dana desa. pasalnya, sejak tahun 2015 pemerintah indonesia mengucurkan dana desa dengan tujuan membangun negeri dari desa. hal ini didasari dengan diterbitkannya undang-undang no.6 tahun 2014 tentang desa dan peraturan pemerintah no. 22 tahun 2015 tentang dana desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (apbn). mencermati pada poin menimbang bahwa alokasi dana desa yang bersumber dari apbn perlu dilakukan secara transparan dan akuntabel dengan memperhatikan kemampuan apbn. pelaksanaan penggunaan anggaran dana desa sudah wajib di kawal penggunaannya. sejak dana desa cair, bermunculan banyak fenomena baru terjadi seperti banyaknya kepala desa ditangkap oleh kpk (komisi pemberantasan korupsi). fenomena ini membuat ketertarikan penulis meneliti akuntabilitas publik terutama akuntabilitas publik dana desa dengan pendekatan nilai-nilai budaya lokal.

sudah banyak penelitian tentang akuntabilitas publik dana desa akan tetapi masih sangat terbatas penelitian akuntabilitas publik dana desa menggunakan pendekatan budaya. akuntabilitas publik merupakan sebuah konstruksi sosial, akuntabilitas tidak hanya sebatas aturan dan prosedur, tetapi juga merupakan konstruksi sosial yang dipengaruhi oleh nilai-nilai, norma, dan praktik sosial yang berlaku dalam suatu masyarakat. oleh karena itu, penelitian ini menggunakan pendekatan budaya diharapkan lahir pemikiran pemikiran baru yang bisa menjadi landasan akuntabilitas publik dana desa. budaya memengaruhi perilaku, nilai-nilai dan norma budaya dapat memengaruhi perilaku individu dalam mengelola dana desa, baik dalam hal kejujuran, transparansi, maupun partisipasi

masyarakat. pendekatan budaya suku kajan ammatoa, dipilih mereka memiliki sistem sosial dan nilai-nilai tradisional yang unik, menawarkan perspektif yang sangat menarik memahami konsep akuntabilitas dalam konteks yang berbeda. sistem tersebut dikenal dengan "*pasang ri kajan*". adapun yang dimaksud dengan "*pasang ri kajan*" merupakan sistem nilai dan norma yang mengatur kehidupan masyarakat kajan ini mencakup aspek-aspek yang relevan dengan akuntabilitas, seperti kejujuran, tanggungjawab, dan keseimbangan antara individu dan komunitas.

seperti kita ketahui dana desa merupakan program pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa (fiszbein, a & schandy, n, (2009), *world bank*, (2018). program ini disalurkan langsung kepada desa untuk digunakan dalam berbagai kegiatan pembangunan (oecd, 2015). penelitian tentang akuntabilitas dana publik seperti dana desa telah banyak dilakukan. beberapa penelitian menunjukkan hasil yang positif, seperti (windy & subardjo, 2023) menemukan bahwa akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana desa di desa pematang panggung telah sesuai dengan peraturan dan terealisasi dengan baik. pembangunan desa berjalan lancar menunjukkan pertanggungjawaban pengelolaan dana desa yang baik. sululing (2017) menemukan bahwa pelaporan keuangan dana desa di desa buon madiri telah sesuai dengan peraturan.

namun penelitian lain menunjukkan adanya tantangan dalam akuntabilitas dana desa, seperti pratiwi & ulfah (2018) menemukan bahwa pemahaman tentang peraturan dana desa tidak berpengaruh terhadap kinerja aparatur desa dalam akuntabilitas dana desa. penerapan prinsip-prinsip *good governance* dan kualitas sumber daya manusia (sdm) lebih berpengaruh terhadap kinerja aparatur desa dalam akuntabilitas dana desa. saputra (2014) menemukan

bahwa transparansi, akuntabilitas, dan komitmen bersama-sama atau terpisah memengaruhi kinerja skpd di aceh selatan. selanjutnya agustin *et al.*, (2017) menemukan anomali antara akuntabilitas dan transparansi publik dalam pengelolaan keuangan daerah di sumatera barat. penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas dana publik adalah topik penting yang perlu terus diteliti. faktor-faktor yang memengaruhi akuntabilitas dana publik beragam, termasuk pemahaman peraturan, *good governance*, sdm, transparansi, dan komitmen. syafiie (2013) menemukan bahwa eksekutif cenderung memperbesar kewenangan keuangan dan non-keuangan, sedangkan *legislative* mengutamakan kepentingan pribadi dalam konteks akuntabilitas anggaran. temuan ini menunjukkan bahwa akuntabilitas dapat dipengaruhi oleh berbagai kepentingan dan agenda politik.

meskipun banyak penelitian tentang akuntabilitas dana publik telah dilakukan, realita di lapangan menunjukkan bahwa akuntabilitas belum mencapai tingkat yang diharapkan. kemungkinan juga para pemangku kepentingan belum paham tentang akuntabilitas yang di definisikan dalam pasal 24 huruf g uu no. 6 tahun 2014 tentang desa menjelaskan bahwa “akuntabilitas adalah azas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” .

selain pemahaman tentang akuntabilitas koppel, (2005) menjelaskan mengapa terjadi penyimpangan dalam praktik akuntabilitas disebabkan adanya patologi. koppel (2005) mengidentifikasi lima tipologi konsepsi akuntabilitas yang dapat mengalami *patologi*: pertama, transparansi: patologi terjadi ketika informasi yang diberikan tidak lengkap, tidak akurat, atau tidak mudah diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan. kedua, tanggung jawab: patologi terjadi ketika tidak

ada pihak yang bertanggung jawab atas tindakan atau keputusannya. ketiga, pengendalian: patologi terjadi ketika mekanisme kontrol tidak efektif atau tidak efisien. keempat, responsivitas: *patologi* terjadi ketika organisasi atau individu tidak responsif terhadap kebutuhan dan tuntutan *stakeholders*. kelima, pertanggungjawaban: patologi terjadi ketika tidak ada mekanisme untuk meminta pertanggungjawaban atas tindakan atau keputusan yang diambil. dampak patologi akuntabilitas diantaranya menurunkan kepercayaan publik terhadap organisasi atau individu, menyebabkan korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, menghambat pengambilan keputusan yang efektif dan melemahkan kinerja organisasi.

contoh patologi akuntabilitas informasi yang tidak lengkap: pemerintah desa tidak mempublikasikan laporan keuangan secara detail (agustin *et al.*, 2017). ketiadaan tanggung jawab: tidak ada pejabat yang bertanggung jawab atas proyek pembangunan yang mangkrak (nurlia & nurdin, 2021). mekanisme kontrol yang tidak efektif: aparat pengawas tidak mampu mendeteksi penyalahgunaan dana desa. ketidakresponsifan: pemerintah desa tidak menghiraukan keluhan masyarakat tentang kualitas pembangunan (citra, 2023). ketiadaan mekanisme pertanggungjawaban: tidak ada proses untuk meminta pertanggungjawaban kepada pejabat yang melakukan pelanggaran (pabubung, 2021). patologi akuntabilitas merupakan hambatan utama dalam mewujudkan akuntabilitas yang optimal.

terwujudnya akuntabilitas diharapkan terwujudnya *good governance* atau pemerintahan yang baik. *good governance* merupakan salah satu aspek penting dalam upaya menurunkan tingkat kemiskinan (kharisma, 2014). sebagai upaya untuk menurunkan angka kemiskinan, pemerintah membuat program alokasi dana desa. adapun program dari alokasi dana desa telah berjalan selama 5 tahun (2015-

2019) dengan total anggaran mencapai kurang lebih 257 triliun rupiah (gatro dan sandra, 2019). pemberian dana desa dengan jumlah besar dapat membuka peluang adanya penyalahgunaan. modus yang ditemukan antara lain penyalahgunaan anggaran, laporan fiktif, penggelapan, dan suap (yusrianto, 2018). alokasi dana desa merupakan program yang penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan memicu pertumbuhan ekonomi di pedesaan. namun, program ini perlu diiringi dengan akuntabilitas dan transparansi yang tinggi untuk menghindari penyalahgunaan dana.

kasus penyalahgunaan dana publik atau korupsi terjadi di luar negeri maupun didalam negeri. seperti vian, (2020) menemukan berbagai bentuk korupsi dalam sistem kesehatan di amerika seperti suap, penggelapan, penipuan, nepotisme, dan pembayaran informal. faktor pendorongnya termasuk tekanan keuangan, konflik kepentingan, dan sistem peraturan yang lemah. vian (2020) juga mengidentifikasi enam tipologi dan kerangka kerja yang memodelkan hubungan yang memengaruhi ruang lingkup dan keseriusan korupsi. kerangka kerja ini menunjukkan bagaimana strategi antikorupsi seperti transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat dapat memengaruhi risiko korupsi. kasus korupsi dana desa di indonesia dipantau oleh indonesia *corruption watch* (icw). hasil pantauan icw menunjukkan peningkatan kasus korupsi dana desa dari tahun ke tahun sejak 2015 hingga semester pertama tahun 2018 (ikhسانuddin, 2018). lebih lanjut lagi ikhsanuddin, (2018) mengatakan pelaku korupsi dana desa terbanyak adalah kepala desa (141 orang), diikuti perangkat desa (41 orang), dan istri kepala desa (2 orang). perangkat desa menempati posisi tiga profesi paling banyak melakukan korupsi (ikhسانuddin dan arif, 2019). korupsi merupakan masalah serius dalam berbagai sistem, termasuk sistem kesehatan dan dana desa.

dana desa yang digulirkan pemerintah sejak tahun 2015 bertujuan untuk membangun desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. namun ironisnya, dana ini justru menjadi salah satu sektor dengan tingkat korupsi yang tinggi. peneliti icw yaitu wana almansyah mengungkapkan bahwa keberadaan dana desa menjadi pemicu kenaikan tren korupsi (anirwan dan irawansyah, 2022). hal ini diperkuat oleh penelitian pattiro yang menunjukkan sekitar 6% dana desa tidak dipergunakan sesuai peruntukannya pada tahun 2015 (amin *et al.*, 2023). direktur eksekutif komite pemantauan pelaksanaan otonomi daerah (kppod) yaitu robert na endy jaweng menyatakan bahwa korupsi anggaran otonomi daerah termasuk dana desa berpotensi meningkat seiring penambahan anggarannya (gumelar dan galih, 2019).

korupsi di indonesia sudah dikategorikan sebagai *extra ordinary crime* atau kejahatan luar biasa (nurdin & hamzah, 2016). salah satu kasus korupsi yang sering disorot adalah penyalahgunaan dana desa dan alokasi dana desa oleh kepala desa. perbuatan korupsi erat kaitannya dengan penyalahgunaan wewenang dan pengaruh pejabat yang menyimpang dari ketentuan hukum sehingga merugikan keuangan negara (gulton, 2018). salah satu faktor utama terjadinya korupsi dana desa adalah tidak adanya transparansi dalam penggunaan anggaran. korupsi dana desa menghambat pembangunan desa, memperlambat peningkatan kesejahteraan masyarakat dan merusak kepercayaan publik terhadap pemerintah. korupsi dana desa adalah permasalahan serius yang harus segera diatasi. upaya pencegahan yang komprehensif dan berkelanjutan diperlukan untuk mewujudkan *good governance* dan pembangunan desa yang berkelanjutan.

riset akuntabilitas selama ini didominasi oleh pendekatan kuantitatif. pendekatan ini mengukur akuntabilitas publik, menganalisis, melihat pengaruh,

berdasarkan indikator-indikator numerik, kemudian mengeneralisirnya. padahal setiap riset bisa saja menghasilkan penemuan yang berbeda. meskipun bermanfaat, pendekatan ini belum mampu mewujudkan akuntabilitas yang sesungguhnya terbukti dengan masih banyaknya *patologi* dalam pelaksanaannya. penelitian ini hadir untuk menawarkan paradigma baru dalam akuntabilitas, yaitu dengan menggunakan pendekatan budaya suku *ammatoa* kajang. pendekatan ini dilandaskan pada kearifan lokal masyarakat adat kajang yang memiliki nilai-nilai luhur tentang pengelolaan dana publik secara berkelanjutan. berdasarkan tinjauan pustaka di atas, penelitian ini akan fokus pada dekonstruksi pemahaman tentang akuntabilitas publik dana desa, khususnya konteks suku *ammatoa* kajang. penelitian ini akan menyelidiki pemahaman akuntabilitas yang selama ini dimiliki oleh berbagai aktor termasuk pemerintah, lembaga pengawas, masyarakat umum dan tokoh adat. dari sekian banyak aktor, penulis akan berfokus kepada pemahaman akuntabilitas yang dipahami oleh pemerintah daerah khususnya pemerintah daerah kabupaten bulukumba. kebaruan dari penelitian ini terletak pada penggunaan pendekatan kearifan lokal dalam mengkritisi penelitian akuntabilitas sebelumnya. harapannya penelitian ini dapat memberikan kontribusi baru dalam bidang pengelolaan dana desa yang berkelanjutan. penelitian ini akan mengeksplorasi bagaimana nilai-nilai budaya suku *ammatoa* kajang dapat diterapkan dalam pengelolaan dana desa. penelitian ini diharapkan dapat melengkapi penelitian akuntabilitas yang sudah ada dan memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut dan membuka jalan bagi terciptanya pengelolaan dana desa yang lebih akuntabel, transparan, dan berkelanjutan.

1.2 pertanyaan penelitian

makna akuntabilitas telah mengalami evolusi selama berabad-abad. awalnya, fokusnya adalah pada akuntabilitas finansial di mana individu atau

organisasi bertanggung jawab atas penggunaan dana. seiring waktu, fokusnya meluas ke akuntabilitas kinerja di mana individu atau organisasi bertanggung jawab atas hasil atau pencapaian tujuan. saat ini, akuntabilitas juga mencakup akuntabilitas proses di mana individu atau organisasi bertanggung jawab atas cara mereka mencapai tujuan.

hal ini memungkinkan kita untuk memahami perspektif unik mereka tentang akuntabilitas dan bagaimana hal tersebut dapat diterapkan dalam konteks dana desa. mengamati bagaimana akuntabilitas dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. adapun pertanyaan dalam penelitian ini:

1. bagaimana masyarakat suku kajang ammatoa memandang akuntabilitas publik dana desa? pertanyaan ini bertujuan untuk memahami konsep akuntabilitas menurut masyarakat adat yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai tradisional.
2. apa saja faktor-faktor yang memengaruhi persepsi masyarakat suku kajang ammatoa terhadap akuntabilitas publik dana desa? pertanyaan ini akan mengidentifikasi faktor-faktor internal dan eksternal yang membentuk pandangan masyarakat tentang akuntabilitas dana desa.

1.3 tujuan penelitian

penelitian ini bertujuan untuk menyelami akuntabilitas publik dana desa dari sudut pandang masyarakat suku kajang ammatoa, sebuah komunitas yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai tradisional. secara spesifik, penelitian ini ingin:

1. mengungkap konsep akuntabilitas publik dalam masyarakat suku kajang ammatoa: memahami bagaimana masyarakat adat ini mendefinisikan dan memaknai akuntabilitas dalam konteks pengelolaan dana desa.
2. membedah praktik pengelolaan dana desa di desa kajang ammatoa: menganalisis praktik pengelolaan dana desa dari perspektif

masyarakat suku kajang ammatoa, dengan fokus pada aspek transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas.

penelitian ini merupakan upaya untuk memahami akuntabilitas publik dana desa dari sudut pandang yang berbeda, yaitu perspektif masyarakat adat. diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi pengembangan teori dan praktik akuntabilitas publik di indonesia.

1.4 kegunaan penelitian

berdasarkan pertanyaan penelitian dan tujuan penelitian, maka kegunaan penelitian terdiri dari :

1. kegunaan teoritis

kegunaan teoritis penelitian ini adalah untuk mengembangkan literatur terkait akuntabilitas di indonesia khususnya kajian terkait akuntabilitas dari sudut pandang budaya yang masih jarang di teliti di indonesia maupun di dunia. hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur dalam disiplin ilmu akuntansi terkait implementasi akuntabilitas yang inklusif.

2. kegunaan praktis

adapun kegunaan praktis penelitian ini adalah diharapkan dapat menjadi masukan bagi pengambil kebijakan (pemerintah daerah) dalam hal implementasi akuntabilitas dalam proses pelaksanaan akuntabilitas yang inklusif, sehingga tujuan dari program tersebut dapat tercapai.

1.5 sistematika penulisan

adapun sistematika penulisan proposal penelitian ini terdiri dari bab 1 pendahuluan yang berisi penjelasan mengapa penelitian ini dilaksanakan pada bagian 1.1 latar belakang. menjelaskan fokus penelitian/rumusan masalah pada

bagian 1.2. menjelaskan tujuan penelitian pada bagian 1.3. dan menjelaskan kegunaan penelitian dari aspek teoritis maupun praktis pada bagian 1.4. adapun landasan teori yang digunakan dalam penelitian akan dijelaskan pada bab 2. metode penelitian yang akan digunakan oleh peneliti dijelaskan pada bab 3.

bab ii

tinjauan pustaka

literatur tentang akuntabilitas menghadirkan keragaman yang kaya mencerminkan kompleksitas konsep ini dalam berbagai konteks nasional dan internasional. hal ini berbeda dengan terminologi lain yang memiliki makna lebih homogen. sinclair (1995) bahkan menyebut akuntabilitas sebagai "konseptual kabur", (dubnick, 2003) menyamakannya dengan "bunglon", dan (mulgan, 2014) menilainya sebagai "dalam ekspansi berkelanjutan". akar kata akuntabilitas berasal dari bahasa anglo-saxon, namun maknanya tidak dapat diterjemahkan secara linier. konsep ini terus berkembang seiring waktu, memperkaya kompleksitasnya.

2.1 teori akuntabilitas

akuntabilitas publik merupakan konsep yang merujuk pada kewajiban pihak yang diberi mandat untuk melaporkan, menjelaskan, dan mempertanggungjawabkan tindakan dan keputusan mereka kepada pihak yang memberikan mandat tersebut. salah satu cara untuk memahami akuntabilitas adalah menggunakan kerangka kerja yang dikemukakan oleh schelder (1997) mendefinisikan tiga jenis akuntabilitas: akuntabilitas jawaban (*accountability of answers*), akuntabilitas proses (*process accountability*), dan akuntabilitas hasil (*accountability for results*). pertama, akuntabilitas jawaban fokusnya adalah pada kewajiban untuk memberikan penjelasan dan pertanggungjawaban atas tindakan atau keputusan yang telah diambil. akuntabilitas jawaban melibatkan transparansi dan keterbukaan informasi. kedua, akuntabilitas proses, menekankan pada kewajiban untuk mengikuti prosedur dan aturan yang telah ditetapkan dalam pengambilan keputusan atau pelaksanaan suatu tindakan. ketiga, akuntabilitas

hasil, berfokus pada pencapaian tujuan atau hasil yang dicapai atau ditetapkan. ketiga jenis akuntabilitas ini saling terkait dan saling melengkapi.

sejalan dengan itu bovens *et al.*, (2014) mengatakan akuntabilitas publik juga melibatkan transparansi dalam pelaporan dan pengungkapan informasi kepada public yang merupakan elemen penting dalam tata kelola pemerintahan yang baik. selain itu, akuntabilitas publik mencakup kewajiban untuk memberikan informasi yang akurat dan dapat diandalkan kepada masyarakat sehingga mereka dapat menilai kinerja pemerintah secara objektif (schillemans, 2016). transparansi ini memungkinkan masyarakat memperoleh gambaran yang jelas tentang tindakan dan kebijakan pemerintah (warren, 2014) yang penting untuk membangun kepercayaan publik, fondasi dari pemerintahan demokratis dan responsive (smyth, 2017).

akuntabilitas publik sering kali diartikan sebagai kewajiban pemerintah untuk memberikan laporan dan justifikasi atas tindakan dan kebijakan mereka kepada publik (nikiforova, 2021). hal ini mencakup berbagai aspek mulai dari penggunaan dana publik hingga pelaksanaan program dan kebijakan yang telah ditetapkan. bovens *et al.*, (2014) mengatakan bahwa akuntabilitas publik melibatkan mekanisme pengawasan dan kontrol yang efektif untuk memastikan pemerintah bertindak sesuai standar yang telah ditetapkan. brandsma dan schillemans (2020) menunjukkan bahwa informasi yang terpercaya tentang kinerja pemerintah dapat meningkatkan respon positif masyarakat terhadap akuntabilitas. mekanisme ini juga membantu mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan yang sering kali menjadi masalah utama dalam pemerintahan (heald, 2018). akuntabilitas publik yang baik dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemerintahan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat (dubnick, 2003).

akuntabilitas publik tidak hanya penting untuk memastikan transparansi dan kejujuran dalam pemerintahan tetapi juga untuk membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah. demokrasi dan supremasi hukum merupakan faktor penting yang mendukung tata kelola akuntabilitas publik yang efektif (canel & luoma-aho, 2019). partisipasi masyarakat sipil juga dapat membantu meningkatkan akuntabilitas publik dan mengendalikan korupsi (li, 2018). lee (2018) menekankan bahwa akuntabilitas publik adalah pilar fundamental dalam membangun tata kelola yang baik, yang mencakup kinerja, transparansi, dan responsivitas pemerintah terhadap kebutuhan masyarakat. akuntabilitas yang baik juga dapat meningkatkan partisipasi warga dalam proses pengambilan keputusan, sehingga kebijakan yang dihasilkan lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat (fung, 2015). selain itu, akuntabilitas yang tinggi dapat mengurangi kesenjangan antara pemerintah dan masyarakat, yang sering kali menjadi sumber ketidakpercayaan dan konflik sosial (o'Neill, 2016).

berdasarkan teori *principal agent*, telah dikemukakan bahwa akuntabilitas berasal dari tindakan pendelegasian wewenang dari prinsipal ke agen, yang memerlukan area diskresional yang mengarah pada kebutuhan untuk mengendalikan agen itu (lindberg 2013; strom 2000). meskipun akuntabilitas dapat dikaitkan dengan berbagai bentuk rezim (gregory 2003; philp 2009; romzek dan dubnick 1998) ini dapat diterapkan pada demokrasi perwakilan karena sistem politik seperti itu menyiratkan tindakan delegasi oleh warga negara kepada pemerintah yang harus bertindak dalam representasi kepentingan mereka (przeworski *et al.* 1999). warga negara itu harus pada gilirannya memiliki mekanisme untuk mengendalikan dan memberi sanksi kepada pemerintah itu. artinya penguasa baik yang dipilih maupun yang tidak dipilih yang membuat keputusan atas nama komunitas politik memiliki kewajiban untuk menanggapi

warga negara (olsen 2013: 447). oleh karena itu, meskipun ada kemungkinan ketegangan antara akuntabilitas dan representasi, mereka tetap 'saling membutuhkan dalam demokrasi modern (lord and pollak 2010). bahkan, perbedaan klasik antara akuntabilitas horizontal dan vertikal juga mengingatkan kita bahwa akuntabilitas memiliki hubungan yang kuat dengan warga negara sebagai forum yang relevan. sementara akuntabilitas horizontal dilakukan oleh lembaga negara yang berbeda (seperti kantor audit, ombudsman dan pengadilan yang secara hukum diberdayakan untuk mempertanyakan lembaga-lembaga negara tersebut (o'donnell, 2014) akuntabilitas vertikal dilakukan dalam hubungan hierarkis; dalam proses 'ke atas' (hood, 2015) misalnya di mana parlemen meminta pertanggungjawaban menteri (bovens et al., 2014) atau dalam proses 'ke bawah' (hood, 2015) khususnya dalam hubungan yang berasal dari tindakan otoritas antara warga negara yang meminta pertanggungjawaban dari pemerintah mereka.

2.1.1 model akuntabilitas

untuk memahami konsep akuntabilitas yang kompleks dan dinamis dalam konteks pemerintahan dan manajemen publik sangat penting untuk mengadopsi perspektif yang tidak hanya mencakup aspek formal tetapi juga dimensi etis dan praktis yang melekat pada praktik akuntabilitas. dalam konteks ini, salah satu cara untuk memahami akuntabilitas adalah menggunakan kerangka kerja yang dikemukakan oleh schelder (1997) mendefinisikan tiga jenis akuntabilitas: akuntabilitas jawaban, akuntabilitas proses, dan akuntabilitas hasil. akuntabilitas jawaban fokusnya adalah pada kewajiban untuk memberikan penjelasan dan pertanggungjawaban. akuntabilitas proses, menekankan pada bagaimana suatu proses dijalankan. akuntabilitas hasil, berfokus pada hasil yang dicapai. ketiga jenis akuntabilitas ini saling terkait dan saling melengkapi.

penelitian ini ingin mendalami pemahaman akuntabilitas pertanggungjawaban, khususnya akuntabilitas publik dana desa dengan pendekatan budaya suku kajang amatoa. seperti kita ketahui dana desa merupakan program pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa (fiszbein, a & schandy,n (2009), *world bank*, 2018). program ini disalurkan langsung kepada desa untuk digunakan dalam berbagai kegiatan pembangunan (oecd, 2015).

2.1.2 teori dekonstruksi jacques derrida

dekonstruksi, sebagai sebuah metode analisis teks yang dikembangkan oleh filsuf prancis jacques derrida adalah pendekatan yang bertujuan untuk mengungkap dan menantang asumsi-asumsi tersembunyi dalam teks. alih-alih mencari makna tunggal yang pasti, dekonstruksi berusaha menunjukkan bagaimana makna teks itu sendiri dibangun melalui serangkaian oposisi biner yang saling bergantung dan saling mengkonstruksi.

derrida berargumen bahwa bahasa bekerja melalui serangkaian oposisi biner seperti baik-jahat, pria-wanita, budaya-alam. oposisi ini sering kali tidak seimbang di mana satu sisi dianggap lebih dominan atau bernilai daripada sisi lainnya. dekonstruksi bertujuan untuk membongkar hierarki ini dan menunjukkan bagaimana makna tergantung pada penindasan salah satu sisi dari oposisi biner tersebut.

konsep akuntabilitas seringkali dikaitkan dengan oposisi biner seperti transparan-tidak transparan, jujur-tidak jujur, objektif-subjektif. dekonstruksi akan mengungkap bagaimana oposisi biner ini sebenarnya tidak setara dan bagaimana satu sisi seringkali dianggap lebih dominan. dekonstruksi akan menunjukkan bagaimana konsep akuntabilitas seringkali digunakan sebagai alat untuk

melegitimasi kekuasaan tertentu. ia akan mengungkap bagaimana "kebenaran" akuntabilitas itu sendiri dibangun dan siapa yang memiliki otoritas untuk mendefinisikannya.

2.1.2.1 biografi singkat jacques derrida dan perkembangan pemikirannya

jacques derrida (1930-2004) adalah seorang filsuf prancis yang dikenal sebagai pelopor teori dekonstruksi. lahir di el biar, aljazair, derrida pindah ke prancis pada usia muda dan belajar di *école normale supérieure* di paris. karya-karyanya, seperti *of grammatology* (1976) menantang pemikiran tradisional barat yang mengutamakan logika biner dan struktur hierarkis dalam bahasa dan teks. melalui pendekatan dekonstruksi, derrida menekankan bahwa makna dalam teks tidak pernah tetap melainkan selalu terbuka terhadap berbagai interpretasi dan dipengaruhi oleh konteks historis dan kultural (hendricks, 2016).

dekonstruksi berakar pada konsep diferensiasi dan *différance*—istilah yang diciptakan oleh derrida untuk menunjukkan bahwa makna dalam bahasa selalu tertunda dan tidak pernah sepenuhnya hadir. diferensiasi merujuk pada proses pembedaan antara elemen-elemen dalam teks, sementara *différance* menyoroti bahwa makna tidak dapat sepenuhnya ditentukan karena selalu bergeser sesuai dengan konteks dan interpretasi baru (derrida, 1978). istilah *différance* ini adalah neologisme yang diciptakan oleh derrida untuk menggabungkan makna "menunda" dan "berbeda". *différance* mengacu pada cara di mana makna selalu ditunda dan ditangguhkan karena ketergantungannya pada konteks dan perbedaan. tidak ada makna yang berdiri sendiri atau final selalu ada kemungkinan interpretasi yang berbeda. logika ketidakpastian, atau aporia, mengacu pada ketidakmungkinan mencapai kebenaran absolut karena selalu ada ambiguitas dan kontradiksi dalam teks (caputo, 1997).

2.1.2.2 relevansi dekonstruksi dalam analisis konsep-konsep normatif seperti akuntabilitas

dalam konteks akuntabilitas, dekonstruksi menawarkan alat analitis yang penting untuk menantang asumsi dasar dan pengertian konvensional. menerapkan prinsip-prinsip dekonstruksi, peneliti dapat mengungkap ambiguitas, kontradiksi, dan ketidak konsistenan yang sering tersembunyi dalam konsep akuntabilitas. dekonstruksi memungkinkan kita untuk melihat bahwa akuntabilitas tidak hanya soal transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas tetapi juga soal bagaimana kekuasaan dan konteks memengaruhi interpretasi dan implementasi akuntabilitas (culler, 1982; norris, 1987).

konsep akuntabilitas dalam pandangan dekonstruktif adalah sebuah konstruksi yang tidak tetap dan terbuka terhadap berbagai interpretasi. derrida berargumen bahwa tidak ada makna yang tunggal atau absolut dan ini berlaku juga pada akuntabilitas. akuntabilitas dapat dipandang sebagai sebuah "teks" yang maknanya selalu dipengaruhi oleh konteks sosial, politik, dan budaya di mana ia diterapkan. oleh karena itu dalam analisis dekonstruksi, akuntabilitas diperlakukan sebagai konsep yang selalu dalam proses dan terbuka untuk revisi dan kritik (derrida, 1976; spivak, 1976).

dekonstruksi mengajak kita untuk menggali ketidak konsistenan, kontradiksi dan ambiguitas dalam praktik akuntabilitas. misalnya, sementara akuntabilitas sering dianggap sebagai hal yang positif dan diinginkan dalam tata kelola dekonstruksi menunjukkan bagaimana penerapan akuntabilitas bisa menjadi sarana kontrol yang represif atau tidak adil, tergantung pada bagaimana dan oleh siapa ia diinterpretasikan dan diterapkan (belsey, 2002; caputo, 1997).

dengan demikian, dekonstruksi mengungkap kompleksitas yang ada di balik konsep yang tampaknya sederhana ini.

pendekatan dekonstruktif dapat digunakan untuk mengidentifikasi "*blind spots*" atau area tersembunyi dalam praktik akuntabilitas yang mungkin tidak terlihat dalam analisis tradisional. "*blind spots*" ini mungkin mencakup aspek-aspek kekuasaan, budaya, atau ekonomi yang memengaruhi bagaimana akuntabilitas dipahami dan diterapkan tetapi tidak diakui secara eksplisit. menggali lapisan-lapisan tersembunyi ini dekonstruksi membantu memperlihatkan dinamika yang lebih kompleks dan sering kali problematis dalam praktik akuntabilitas (stockenstrand, 2019).

2.1.2.3 akuntabilitas sebagai teks terbuka

dalam pendekatan derridean, akuntabilitas dapat dilihat sebagai sebuah teks yang terbuka untuk berbagai interpretasi. hal ini berarti bahwa akuntabilitas tidak memiliki makna yang tetap atau universal melainkan bergantung pada konteks di mana ia diterapkan dan siapa yang menerapkannya. akuntabilitas sebagai teks menunjukkan bahwa setiap upaya untuk mendefinisikan atau menerapkan akuntabilitas selalu melibatkan interpretasi yang dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kekuasaan, budaya, dan sejarah (derrida, 1978; norris, 1987).

2.1.2.4 pengaruh konteks dan kekuasaan dalam pembentukan makna akuntabilitas

konteks dan kekuasaan memainkan peran penting dalam membentuk bagaimana akuntabilitas dipahami dan diterapkan. dalam pendekatan dekonstruktif, tidak ada satu pun makna akuntabilitas yang dapat dianggap netral atau obyektif. sebaliknya, makna tersebut selalu dibentuk oleh dinamika kekuasaan yang berlaku di dalam konteks tertentu. misalnya, bagaimana

akuntabilitas dipahami di negara maju bisa sangat berbeda dengan bagaimana ia dipahami di negara berkembang, tergantung pada struktur kekuasaan yang ada (belsey, 2002; lucy, 2004).

dekonstruksi mengajak kita untuk mempertimbangkan kompleksitas dan ketidakpastian yang ada dalam pengelolaan akuntabilitas. menyoroti ketidakpastian ini, dekonstruksi membantu kita memahami bahwa mekanisme akuntabilitas tidak selalu memberikan hasil yang diharapkan dan bahkan dapat memperburuk ketidakadilan jika diterapkan tanpa memperhatikan konteks dan nuansa yang lebih dalam. hal ini menuntut adanya refleksi kritis dan terus-menerus terhadap bagaimana akuntabilitas diterapkan dan dievaluasi (stockenstrand, 2019).

2.1.2.5 studi kasus dalam penerapan paradigma derrida

penerapan dekonstruksi dalam studi akuntabilitas telah dilakukan dalam berbagai sektor termasuk sektor publik, korporasi, dan organisasi non-pemerintah. misalnya dalam studi tentang akuntabilitas di sektor publik, dekonstruksi digunakan untuk meneliti bagaimana kebijakan transparansi sering kali digunakan sebagai alat untuk memperkuat kekuasaan tertentu daripada benar-benar memberdayakan masyarakat (culler, 1982; caputo, 1997). contoh lain adalah dalam korporasi di mana dekonstruksi membantu mengungkap bagaimana retorika akuntabilitas dapat digunakan untuk menutupi praktik-praktik yang sebenarnya tidak etis.

studi kasus yang menggunakan pendekatan derrida dalam menganalisis praktik akuntabilitas sering kali menunjukkan bagaimana konsep-konsep seperti transparansi dan pertanggungjawaban bisa dimanipulasi untuk tujuan tertentu. dalam sebuah studi kasus misalnya sebuah perusahaan multinasional mungkin mempromosikan kebijakan akuntabilitas untuk menunjukkan tanggung jawab

sosialnya, tetapi melalui analisis dekonstruktif, ditemukan bahwa kebijakan tersebut lebih bertujuan untuk melindungi kepentingan bisnis daripada memenuhi tanggung jawab sosial yang sebenarnya (stockenstrand, 2019). pendekatan ini mengungkap bahwa akuntabilitas sering kali lebih rumit dan terikat oleh kepentingan-kepentingan yang berbeda.

2.2 perspektif budaya suku kajang (ammatoa)

suku kajang yang terletak di kabupaten bulukumba, sulawesi selatan memiliki sejarah panjang yang kaya akan tradisi dan kepercayaan yang unik. suku ini dikenal sebagai komunitas adat yang memegang teguh ajaran leluhur yang dikenal dengan sebutan "*pasang ri kajang*." ajaran ini menjadi landasan utama dalam kehidupan sehari-hari mereka, mencakup aturan sosial, etika, dan spiritualitas (faisal & majid, 2018). struktur sosial suku kajang sangat terorganisir dengan adanya pemimpin adat yang disebut *ammatoa*, yang bertanggung jawab atas pengawasan dan pelaksanaan hukum adat.

struktur sosial suku kajang bersifat hierarkis dan didasarkan pada nilai-nilai kolektivitas dan kebersamaan. masyarakat kajang tidak mengenal konsep kepemilikan individu atas tanah, melainkan semua sumber daya alam dianggap sebagai milik bersama yang harus dijaga dan dilestarikan untuk generasi mendatang. hal ini tercermin dalam praktik pertanian dan pengelolaan lingkungan yang mereka lakukan, yang semuanya berdasarkan prinsip keberlanjutan dan penghormatan terhadap alam (rahim, 2019).

kepercayaan dan struktur sosial ini memiliki dampak signifikan terhadap cara suku kajang memandang akuntabilitas dan pengelolaan sumber daya. dalam masyarakat kajang, tanggung jawab sosial tidak hanya dipandang sebagai kewajiban individu, tetapi juga sebagai tanggung jawab kolektif yang harus dipertanggungjawabkan kepada seluruh komunitas. nilai-nilai ini mempengaruhi

bagaimana mereka menilai kebijakan dan program yang diterapkan oleh pemerintah, termasuk dalam pengelolaan dana desa.

2.2.1 makna akuntabilitas dalam budaya lokal (ammatoa)

konsep akuntabilitas perlu diinterpretasikan dalam konteks budaya lokal agar dapat diterima dan dipraktikkan secara efektif. di beberapa daerah, nilai-nilai budaya seperti musyawarah mufakat dan gotong royong dapat menjadi landasan untuk membangun akuntabilitas yang sesuai dengan budaya setempat. memperhatikan budaya lokal dalam membangun sistem akuntabilitas sangatlah penting. dalam budaya bali: akuntabilitas dimaknai sebagai keseimbangan antara hubungan manusia dengan tuhan, manusia dengan manusia, dan manusia dengan alam. budaya jawa: akuntabilitas dimaknai sebagai tanggung jawab untuk menjaga keharmonisan dan keseimbangan dalam masyarakat. budaya batak: akuntabilitas dimaknai sebagai kepatuhan terhadap adat istiadat dan nilai-nilai budaya yang berlaku.

budaya dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dan memastikan bahwa sistem akuntabilitas yang diterapkan sesuai dengan nilai-nilai dan norma yang berlaku di desa. cahyono (2017) mencontohkan bahwa di beberapa desa di jawa, tradisi musyawarah desa menjadi wadah bagi masyarakat untuk bersama-sama mengawasi penggunaan dana desa.

dhipayanti & dewi, (2023) mengungkapkan akuntabilitas pengelolaan keuangan berlandaskan konsep budaya tri hita karana dan implementasi *green accounting* di desa tegal badeng barat, jembrana, bahwa (1) sistem pengelolaan keuangan subak pemangket awen barat sudah berjalan dengan baik. (2) akuntabilitas pengelolaan alokasi dana subak pemangket awen barat sudah berdasarkan pada prinsip transparansi maupun prinsip akuntabilitas. pengalokasian dana subak sesuai dengan konsep tri hita karana dimana aliran

dana telah disalurkan untuk kepentingan upacara, bantuan sosial dan sarana prasarana kebersihan lingkungan. (3) penerapan *green screen accounting* di subak pemangket awen barat sudah berjalan dengan baik.

partisipasi merupakan kunci dalam memperkuat akuntabilitas. hal ini diwujudkan melalui keikutsertaan individu secara aktif dalam organisasi, baik secara fisik maupun psikologis untuk mencapai tujuan bersama. partisipasi bukan hanya sebatas kehadiran fisik tetapi juga melibatkan aspek psikologis. individu yang berpartisipasi memberikan dampak pada pengambilan keputusan dan bertanggung jawab atas hasil yang dicapai. brown (2019) mendefinisikan partisipasi sebagai mekanisme yang melibatkan individu secara langsung dalam penyusunan anggaran.

partisipasi masyarakat dapat memperkuat akuntabilitas (pahlawan *et al.*, 2020; mada *et al.*, 2017). hal ini terjadi karena masyarakat dapat mengawasi penggunaan dana, memberikan saran untuk meningkatkan kinerja pemerintah. pemerintah menjadi lebih transparan dan bertanggung jawab kepada masyarakat. ketika masyarakat terlibat dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan program pemerintah akan lebih terbuka dan bertanggung jawab atas tindakannya. hubungan antara akuntabilitas dan tata kelola pemerintahan yang baik adanya mekanisme akuntabilitas. bovens (2007) memberikan lima alasan untuk mekanisme akuntabilitas publik termasuk kebutuhan untuk memastikan kontrol demokratis dari lembaga-lembaga publik untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan dan untuk meningkatkan kepercayaan publik dalam pengaturan pemerintahan. mekanisme akuntabilitas publik sangat penting untuk memastikan tata kelola pemerintahan yang baik. akuntabilitas publik membantu mencegah korupsi, meningkatkan kepercayaan publik meningkatkan kinerja pemerintah, dan memperkuat demokrasi.

